

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

##### A.1. Pelaksanaan PPK

###### 1. Efektifitas Pemberdayaan dalam PPK

a) Kesesuaian Pemberdayaan dengan dimensi Konteks

Program pemberdayaan yang dilakukan: (i) untuk penetapan jenis pembangunan prasarana dan penyediaan pinjaman modal usaha bagi kelompok perempuan (SPP) telah sesuai dengan konteks; (ii) sementara untuk pelayanan/pendampingan dan pendidikan /pelatihan bagi rumah tangga miskin (RTM) tidak sesuai konteks.

b) Kesesuaian input yang disediakan dalam program pemberdayaan

Input yang disediakan yang berupa: (i) jenis prasarana fisik yang akan dibangun, penyelesaian masalah pembangunan prasarana, dan sosialisasi pembangunan prasarana relative cukup; (ii) dana, tenaga pendamping dan pendidikan/pelatihan khususnya bagi rumah tangga miskin (RTM) tidak mencukupi.

c) Kesesuaian kegiatan dengan proses pemberdayaan

(i) Proses yang dilakukan lebih dominan pada pelaksanaan pembangunan prasarana fisik dibandingkan dengan proses pemberdayaan. Proses yang dilakukan mencakup *perencanaan* (mulai usulan sampai penetapan proyek), *pelaksanaan* (persiapan material sampai pelaksanaan pembangunan prasarana), *evaluasi* (mulai LPJ oleh TPK, supervisi UPK sampai MDST), dan *pemeliharaan* (pembentukan dan pelatihan TP3)

- (ii) Tiga aspek yang relative sesuai dengan proses (terutama proses pembangunan prasarana fisik dan penyediaan pinjaman modal bagi SPP) dan bukan proses pemberdayaan) adalah pendidikan/pelatihan bagi pelaku pembangunan prasarana (TPK dan KPMD), penyelesaian masalah dan supervisi atau evaluasi.

d) Pencapaian produk pemberdayaan dalam PPK

- (i) Produk berupa output program seperti prasarana fisik, pelayanan pinjaman modal bagi kelompok perempuan (SPP)/pengembangan lembaga keuangan UPK relative tercapai.
- (ii) Sementara outcomes program berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan, pengembangan prasarana fisik secara lestari dan penyediaan lapangan kerja bagi RTM untuk jangka panjang tidak tercapai.

## 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Program Pemberdayaan

a) Faktor Pendukung

- (i) Kontekstualisasi visi program
- (ii) Kontesktualisasi sumberdaya yang disediakan oleh program
- (iii) Visi output program
- (iv) Pendidikan/pelatihan dalam pencapaian output

b) Faktor Penghambat

- (i) Rendahnya kinerja evaluasi (E7) pemberdayan, dan belum diterapkannya evaluasi bermuatan pemberdayaan
- (ii) Sosialisasi program bagi RTM dan masyarakat non-SPP rendah (RTM dan masyarakat miskin non-SPP yang merupakan sasaran utama tidak memahami konsep program).

- (iii) Rendahnya kinerja pendampingan dan penyadaran bagi RTM maupun SPP (rendahnya kinerja transformasi sosial dalam PPK).

### 3. Rekomendasi Pemberdayaan

Melihat hasil keseluruhan pemberdayaan masyarakat yang mencapai hasil kurang (OP) dan sedang (KT), serta mencermati faktor penghambat yang ada, maka strategi pemberdayaan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Bogor adalah sbb:

- a) Untuk menjalankan suatu program perlu ditetapkan tujuan umum dan khusus yang tegas dan jelas secara partisipatif (kombinasi *top down* dan *bottom up*), sehingga antar pihak dan pelaku tidak terjadi perbedaan penafsiran.
- b) Jenis program (pemberdayaan) yang akan dilaksanakan agar menggunakan pendekatan atau model pembangunan sosial, karena proses transformasi sosial tidak akan berjalan jika program tetap dominan menggunakan pendekatan teknis-ekonomis atau pembangunan fisik
- c) Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka sosialisasi program perlu disampaikan secara intensif dan berulang kepada masyarakat luas, secara formal maupun informal.
- d) Evaluasi yang komprehensif dan melibatkan masyarakat (evaluasi yang bermuatan pemberdayaan) perlu dilakukan secara rutin dan terencana, dan telah disepakati bersama antara pelaksana program dan masyarakat sejak awal dimulainya program.
- e) Penetapan kelompok sasaran utama perlu ditegaskan secara formal dari awal oleh program, sehingga tidak menyulitkan para pelaksana di lapangan dan menghambat pencapaian produk program.
- f) Pendampingan sebagai proses penyadaran kepada kelompok sasaran utama perlu disediakan secara khusus oleh program, dilakukan oleh tenaga pendamping khusus yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga mempunyai kapasitas memadai untuk tugas tersebut.

## **A.2. PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

1. Upaya peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat miskin adalah: (i) penyiapan penduduk miskin atau RTM/rumah tangga miskin hingga layak mendapat pinjaman modal; (ii) pendampingan untuk proses penyadaran secara terus menerus oleh pandamping khusus; (iii) penyelenggaraan pendidikan keterampilan usaha; dan (iv) penyediaan modal yang memadai dengan mekanisme yang mudah bagi penduduk miskin.
2. Untuk menjaga agar terjadi peningkatan kesejahteraan secara terus menerus, perlu dilakukan:
  - (i) pengembangan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan bagi individu anggota maupun kelompok; (ii) dengan pengembangan modal/uang untuk menghasilkan jasa; dan (iii) pengembangan investasi untuk usaha produktif di desa milik kelompok maupun individu, yang akan memberikan pendapatan bagi kelompok, juga akan membuka lapangan kerja baru jangka panjang di pedesaan.

## **A.3. OTONOMI DAERAH**

1. Dalam era otonomi daerah sudah semestinya pemerintah memberikan peluang atau kebebasan kepada daerah untuk berinisiatif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat; karena sangat dimungkinkan adanya keberagaman antar daerah. Dengan demikian bukan saatnya lagi pemerintah memaksakan suatu program kepada pemerintah daerah, kecuali pemerintah membiayai seluruhnya.
2. Suatu program diharapkan akan berkelanjutan dengan cara memacu inisiatif daerah, sehingga akan tercipta suatu program yang berpeluang besar untuk “sukses”. Oleh sebab itu jika dengan cara yang “memaksa” seperti pelaksanaan PPK/PNPM sulit diharapkan akan bisa berkelanjutan.

### A.3. IMPLIKASI PENELITIAN

#### 1. Evaluasi Program

Dengan pertimbangan agar dalam evaluasi program dapat berlangsung proses pemberdayaan dan sekaligus juga terjadi peningkatan partisipasi peserta program, maka perlu dirumuskan suatu model evaluasi program yang bermuatan pemberdayaan dan berlangsung secara partisipatif. Model evaluasi dimaksud adalah evaluasi yang memberdayakan diri secara partisipatif/ evaluasi pemberdayaan partisipatoris (*participatory empowerment evaluation*).

Pemikiran ini dilatarbelakangi bahwa selama pelaksanaan PPK, proses pemberdayaan berlangsung kurang maksimal, dalam arti hanya terjadi secara nyata bagi para pelaku desa (TPK dan KPMD). Itupun hanya terjadi dalam hal peningkatan keterampilan teknis (pembangunan prasarana fisik dan pengelolaan modal pinjaman), dibanding dengan peningkatan kesadaran untuk memberdayakan diri. Proses peningkatan kesadaran dan pemberdayaan secara tidak langsung diduga kuat justru terjadi ketika diterapkannya konsep swakelola dan penerapan prinsip swadaya masyarakat dalam pembangunan prasarana. Sedangkan proses pemberdayaan bagi rumah tangga miskin (RTM) relatif tidak terjadi, karena tidak adanya agenda khusus pemberdayaan yang ditujukan bagi mereka.

Oleh sebab itu sudah saatnya pihak pelaksana program untuk mengevaluasi model evaluasi program pemberdayaan khususnya dalam program PPK/PNPM Mandiri Pedesaan (evaluasi meta) dan mencoba menggunakan model evaluasi program yang bermuatan pemberdayaan secara partisipatif (evaluasi pemberdayaan partisipatoris) atau *participatory empowerment evaluation*.

## 2. Pengembangan Kelembagaan

Faktor *pengembangan kemandirian* selama ini seperti dilupakan, meskipun programnya sendiri merupakan program pengembangan kemandirian (seperti PNPM Mandiri Pedesaan), sehingga berbagai program sosial, penanggulangan kemiskinan maupun pengembangan kelembagaan tidak mampu berkelanjutan. Kemandirian selalu hanya dipahami sebagai hasil akhir, tanpa memperhitungkan bahwa ia merupakan faktor kunci menuju kondisi mandiri. Oleh sebab itu dalam pengembangan kelembagaan di pedesaan selain lima variabel yaitu *kepemimpinan, doktrine, program, sumberdaya, internal struktur*, sangatlah penting memperhatikan secara sungguh-sungguh variabel kunci *pengembangan kemandirian*.

Setelah lima tahun bekerja di bawah "binaan" program, maka suatu organisasi pengelola pemberdayaan (untuk PPK adalah UPK tingkat kecamatan) perlu *disapah* (dilepas), sehingga mempunyai kewenangan penuh atau otonom karena dianggap telah mandiri. Proses ini diawali sejak tahun pertama dengan persiapan berupa "pendidikan" tentang peningkatan otoritas secara bertahap dan setelah *disapah* dapat beroperasi dengan mekanisme kerja yang dikembangkan selama program berjalan. Pengembangan kemandirian khususnya bagi UPK dapat diwujudkan melalui proses menuju otonomi secara penuh yang tahapan kegiatan operasionalnya dirancang bersama antara staf UPK dan program, dilaksanakan sejak awal (tahun pertama) sampai akhir tahun ke lima menjelang masa *penyapihan*.

## 3. Otonomi Daerah

Terjadinya konflik antara pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan PPK, khususnya dalam hal pembiayaan, maka jalan keluarnya adalah: (a) untuk jangka pendek adalah dengan melakukan koordinasi antar pihak menggunakan model *mutual adjustment*, yaitu kerjasama saling percaya antar aktor pemerintahan, dengan berprinsip bahwa sesama aparatur negara akan saling

mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelaksanaan PPK/PNPM, sekalipun ada masalah mendasar; (b) untuk jangka panjang agar ada kepatuhan dari semua pihak (terutama pemerintah) dalam membuat undang-undang, sehingga terjadi kejelasan kewenangan secara tegas antara pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

#### **A.4. SARAN PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk mencari jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan berikut: (a) Mengapa pemerintah tetap memaksakan pelaksanaan PPK/PNPM dengan dana yang makin besar dan jangkauan wilayah semakin luas, padahal dari sisi *outcomes* tidak berhasil mewujudkannya; motif apa yang mendasarinya; (b) Mengapa pemerintah tetap memaksakan kepada pemerintah daerah (daerah otonom) untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat secara seragam di seluruh Indonesia PPK/PNPM, padahal dalam era otonomi daerah (sangat dimungkinkan suatu keberagaman), sehingga sudah tidak tepat lagi untuk menyeragamkan suatu program dari pusat